

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard. (2009). *Kajian Aktual Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Hidayat, Abu. (2008). *Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Widyatama, Bandung.
- Hutomo, Sigit. (2009). *Pajak Penghasilan ; Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. (2007). *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B terpadu*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2007). *Perpajakan : Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan. (2003). *Dasar-dasar Statistika*. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Soemitro, Rochmat. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Penerbit Eresco, Bandung.
- Supangkat, Andi. (2005). *Statistika untuk ekonomi dan bisnis*. Fakultas Ekonomi dan Fakultas Bisnis Manajemen Universitas Widyatama, Bandung.

<http://www.pajak.go.id//>

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.03/2008 yang menetapkan: Bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, demikian juga dengan badan, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak paling lama satu bulan setelah usaha mulai dijalankan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang kriteria orang pribadi yang nyata-nyata tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 / KMK.01 / 1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Reorganisasi pada Dirjen Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, Tugas dan Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-69/PJ/2009 tentang Tata Cara Pindah NPWP.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-59/PJ/2008 tentang Pemberian NPWP Bagi Karyawan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.8/1988 tanggal 2 Oktober 1988 tentang Wajib Pajak non efektif

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-19/PJ/2007 tentang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.